



## Framing The News of Joko Widodo's Leadership in Tempo Magazine Special Edition: 10 Years of Jokowi, July 29–August 4, 2024

### Framing Pemberitaan Kepemimpinan Joko Widodo Dalam Majalah Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi 29 Juli – 4 Agustus 2024

Dinda Rezky Audia<sup>1</sup>, Rahmawati Latief<sup>1\*</sup>, Mudzhira Nur Amrullah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

#### Keywords

Framing;  
News;  
Leadership

#### ABSTRACT

*Tempo Magazine Special Edition 10 Years of Jokowi, entitled Nawadosa Jokowi, is a magazine that raises the issue of Jokowi's performance over ten years, as written in eighteen news articles. This study aims to examine the framing of news articles by Tempo Magazine regarding Joko Widodo's leadership performance for ten years. This study uses qualitative descriptive research with Robert M. Entman's framing analysis method, which aims to examine the framing of news articles by Tempo Magazine in constructing reality. The researcher selected a corpus of twelve news articles as a representation of Tempo Magazine's Special Edition on Jokowi's 10 Years. The results of this analysis found that the presentation of data in the news articles written by Tempo Magazine was key to its courage in writing critical analyses of Jokowi's performance. Second, the researcher observed that Tempo Magazine, in its writing of news about Jokowi's leadership, tends to take a stance in favor of democratic values. Therefore, the researcher found that Tempo Magazine's writing can create a negative perception among readers in assessing Jokowi's leadership performance.*

#### Kata Kunci

Framing;  
Berita;  
Kepemimpinan

#### ABSTRAK

Majalah Tempo Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi berjudul Nawadosa Jokowi merupakan majalah yang mengangkat isu kinerja Jokowi selama sepuluh tahun yang tertulis dalam delapan belas berita. Penelitian ini bertujuan untuk melihat framing berita yang dilakukan oleh Majalah Tempo terkait kinerja kepemimpinan Joko Widodo selama sepuluh tahun. Jenis penelitian menggunakan deksriptif kualitatif dengan metode analisis framing Robert M. Entman yang bertujuan untuk melihat pembingkaian berita yang dilakukan oleh Majalah Tempo dalam mengkonstruksi suatu realitas. Peneliti memilih korpus dua belas berita sebagai representasi dari pemberitaan Majalah Tempo Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi. Hasil analisis ini menemukan bahwa penyajian data pada berita yang dituliskan oleh Majalah Tempo menjadi kunci keberaniannya dalam menuliskan analisis yang kritis terhadap kinerja Jokowi. Kedua, peneliti melihat bahwa Majalah Tempo dalam penulisan berita kepemimpinan Jokowi cenderung mengambil sikap keberpihakan kepada nilai-nilai demokrasi sehingga menimbulkan persepsi negatif.

\*Corresponding author

Rahmawati Latief. Program Studi Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar. Kampus 2 UIN Alauddin Makassar adalah di Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. 92113.

Email: [Rahmawati.latief@uin-alauddin.ac.id](mailto:Rahmawati.latief@uin-alauddin.ac.id)

<https://doi.org/10.22487/ejk.v12i3.2453>

Received 26 November 2025; Received in revised form 24 December 2025; Accepted 25 December 2025

Published 26 December 2025; Available online 26 December 2025

2302-2035 | 3047-9614 / © 2025 The Authors. Managed by the Department of Communication Studies, Faculty of Social and Political Sciences, Tadulako University. Published by Tadulako University.

This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

## 1. Pendahuluan

Kinerja kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun lamanya menuai persepsi pro-kontra di kalangan masyarakat. Selama dua periode sejak tahun 2014 hingga 2024 menjabat sebagai presiden Republik Indonesia Ketujuh, tak dapat dipungkiri Jokowi memberi banyak perubahan terutama pada pembangunan infrastruktur yang semakin berkembang. Tak hanya itu, pembangunan ini dilakukan secara merata di luar pulau Jawa. Hal ini sejalan dengan program prioritas Jokowi pada periode pertama. Perkembangan ini juga yang menjadi aspek penunjang terpilihnya kembali Jokowi pada pemilihan presiden tahun 2019.

Periode kedua Jokowi mulai memfokuskan kabinetnya pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama dalam bidang pengetahuan teknologi agar masyarakat Indonesia mampu bersaing dengan negara asing. Meski demikian, pembangunan infrastruktur yang menjadi program prioritas Jokowi pada periode pertama tetap dilanjutkan. Kerja keras Jokowi selama dua periode dinilai memuaskan oleh masyarakat. Penilaian ini didasari oleh hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indikator menyatakan sebanyak 75% masyarakat merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Mawardi, 2024).

Masyarakat tidak hanya merasa puas pada infrastruktur dan sumber daya manusia yang semakin berkembang. Kepuasan masyarakat juga diukur dari penyaluran bantuan sosial yang dianggap merata. Kebutuhan ekonomi masyarakat menengah ke bawah terbantu dengan adanya bantuan sosial yang dikeluarkan selama masa pemerintahan Jokowi. Berdasarkan survei kepemimpinan nasional yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada 27 Mei hingga 2 Juni 2024 berhasil mengumpulkan data yang mengatakan sebanyak 21,7 persen responden mengaku puas pada pembagian bansos yang dilakukan oleh pemerintah. Frekuensi ini dianggap sebagai peningkatan kualitas bagi pemerintah (Aranditio, 2024).

Beberapa jalan di desa-desa terpencil juga terkena dampak besar selama pemerintahan Jokowi. Konektivitas jalan seperti jembatan yang membantu masyarakat dalam beraktivitas semakin meningkat selama masa kepemimpinannya. Tercatat selama 10 tahun pemerintahan Jokowi telah membangun 366 ribu kilometer jalan desa dan 1,9 juta meter jembatan desa. Tidak berhenti disitu, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru menjadi bukti nyata produktivitas kinerja Jokowi (Jumadil, 2024).

Pemberitaan terkait Jokowi yang dipublikasikan oleh media massa menjadi salah satu faktor yang dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap kualitas kepemimpinan Jokowi selama dua periode. Contohnya, berita ‘Pemerataan dan Perkembangan Pesat Infrastruktur di Era Jokowi’ yang diterbitkan oleh kompas.com memuat tanggapan masyarakat terkait perbaikan beberapa jalan yang selama ini rusak hingga menjadi suatu akses yang layak digunakan. Berita ini tentu akan membangun citra positif terkait kepemimpinan Jokowi bagi para pembacanya. (Dwih dan Mulyawan, 2024).

Dibalik pemerataan pembangunan hingga perbaikan jalan yang dilakukan oleh Jokowi dinilai belum seimbang dengan kondisi negara. Ambisi Jokowi dalam mengembangkan negara Indonesia ternyata memiliki dampak negatif pada beberapa aspek termasuk melonjaknya utang negara. Pembangunan yang dilakukan secara terus-menerus membuat utang pemerintah era Jokowi mencapai Rp 8.461 triliun. Angka ini melonjak sebanyak Rp 5.853 triliun dari sebelumnya. Kenaikan ini dipicu oleh berbagai faktor termasuk kebutuhan pembangunan infrastruktur (Gunanto, 2024).

Berbanding terbalik dengan infrastruktur yang terus berkembang, kualitas pendidikan di Indonesia justru semakin menurun. Padahal, anggaran yang dikeluarkan untuk keperluan pendidikan terus naik namun kualitas sumber daya manusia yang dicetak justru tidak seimbang dengan anggaran yang telah dikeluarkan. Bahkan anggaran ini menjadi anggaran pendidikan tertinggi sepanjang sejarah. Laporan *Programme for International Student Assessment* (PISA) menegaskan jika kualitas pendidikan di Indonesia terus merosot di era Jokowi. Skor PISA Indonesia tahun 2022 merupakan terendah sepanjang sejarah. Anggaran pendidikan yang digunakan sebesar Rp 600 triliun. Dana tersebut antara lain digunakan untuk Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), tunjangan guru, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), BOP Pendidikan Kesetaraan, dana abadi pendidikan, penelitian, perguruan tinggi dan kebudayaan (Andrearin, 2024).

Contoh lainnya terdapat pada berita berjudul ‘Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan’ yang diterbitkan oleh tempo.co menuliskan tentang tekad Jokowi yang tetap melakukan perubahan pembangunan meski ekonomi dunia dan negara Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Narasi yang dituliskan dalam berita ini tentu akan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menilai pemerintahan Jokowi (Firmansyah, 2022).

Ditengah persepsi pro kontra masyarakat, kemunculan *Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)* yang menobatkan Jokowi sebagai finalis tokoh terkorup 2024 menjadi puncak perdebatan. Nama Jokowi masuk sebagai finalis tokoh terkorup berdasarkan survei daring yang diterima oleh OCCRP. Pemberitaan terkait sisi buruk kepemimpinan Jokowi semakin marak diberitakan termasuk pada majalah Tempo (Nugroho, et.al., 2025).

Tiga bulan sebelum akhir masa jabatan Jokowi sebagai presiden Republik Indonesia tepatnya pada 29 Juli 2024, Majalah Tempo menghebohkan publik dengan menerbitkan majalah edisi khusus 10 tahun Jokowi yang berjudul Nawadosa Jokowi. Majalah ini dijual dalam bentuk cetak melalui dua lokapasar/marketplace yaitu Shopee dan Tokopedia pada akun Majalah Tempo Official Store. Hasil penjualan Majalah Tempo pada kedua lokapasar tersebut dapat dilihat berdasarkan data dibawah ini:

Tabel 1. Penjualan Majalah Tempo Nawadosa Jokowi

No	Nama Lokapasar/Marketplace	Penjualan
1.	Shopee	3.200 eksemplar
2.	Tokopedia	4.851 eksemplar
	<b>Total</b>	<b>8.051 eksemplar</b>

Jumlah majalah Nawadosa Jokowi yang terjual di akun shopee mencapai tiga ribu dua ratus eksemplar, sedangkan pada Tokopedia majalah ini terjual sebanyak empat ribu delapan ratus lima puluh satu eksemplar. Akumulasi jumlah penjualan majalah ini menginjak angka delapan ribu lima puluh satu eksampler. Angka tersebut menjadikan majalah ini masuk ke dalam majalah best seller dari majalah Tempo.

Permintaan yang sangat tinggi membuat majalah ini cepat hilang di pasaran. Salah satunya pada akun di platform X seorang pakar tata kota, Marco Kusumawijaya memposting cuitan jika majalah ini hilang dan tidak ditemukan lagi di pasaran karena ada pihak yang memborong. Namun, pihak Tempo mengaku tidak mengetahui secara pasti hal tersebut. Hal ini memberi gambaran jika Majalah Tempo edisi khusus 10 tahun Jokowi berjudul Nawadosa Jokowi disambut antusias oleh masyarakat Indonesia (Dewi, 2024). Nawadosa Jokowi merupakan majalah edisi 29 Juli – 4 Agustus 2024. Majalah ini

terdiri dari 18 dosa Jokowi selama menjadi Presiden Republik Indonesia. Terbitnya majalah ini memberi pemahaman bagi masyarakat untuk menelisik kinerja Jokowi selama 2 periode menjabat sebagai pemimpin negara.

Majalah Nawadosa Jokowi membawa 18 dosa Jokowi terhadap pemerintah diantaranya mengenai isu dinasti dan oligarki politik, pelemahan institusi demokrasi, TNI di ranah sipil, konflik papua tak kunjung padam, runtuhan sistem pendidikan, watak patron-klien kepolisian, politisasi kejaksaan, pelemahan KPK, kegagalan menangani pelanggaran HAM berat, karut-marut mengelola APBN, runtuhan independensi Bank Indonesia, ketergantungan pada utang Cina, pemaksaan Ibu Kota Nusantara, gimik diplomasi luar negeri, kerusakan lingkungan, konflik agrarian, kriminalisasi atas nama proyek strategis nasional, kebebasan sipil yang menyempit

Selain menuliskan dosa Jokowi, Tempo juga mengaitkannya dengan cita-cita Jokowi yang tertuang dalam Nawacita Jokowi pada awal kepemimpinannya. Peneliti telah melakukan observasi pada Majalah Tempo berjudul Nawadosa Jokowi edisi 10 tahun Jokowi dan mendapati 18 dosa pemerintahan Jokowi yang ditulis secara rinci dengan data penguatan narasi. Isi dari majalah ini tentu akan memberi pandangan yang berbeda terhadap kinerja Jokowi selama dua periode bagi para pembacanya.

Pemberitaan Tempo pada edisi ini dianggap penting oleh media massa dan masyarakat karena merekam jejak kinerja pemerintahan Republik Indonesia selama sepuluh tahun dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sekaligus membaca studi kritis yang dilakukan Tempo sebagai *watchdog* untuk mengawasi, mengkritik dan mengontrol kekuasaan dan kinerja pemerintahan. Tempo sebagai media massa memiliki peran sentral dalam pembentukan opini publik tentang peristiwa yang terjadi. Bahkan dalam pandangan konstruktivis, Tempo bukanlah sekadar *channel* yang bebas makna, tetapi Tempo berperan sebagai subjek yang mengkonstruksi realitas sosial di dalam masyarakat yang memuat pandangan, perspektif subjektif dan bias dalam pemberitaannya.

Beberapa riset yang lain juga membahas kajian analisis framing mengenai kinerja Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia Ketujuh ketika berpasangan dengan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Salah satunya riset yang dilakukan Fauzan Kamil dengan memilih isu Analisis Framing Pemberitaan Tiga Tahun Jokowi-JK pada Republika Online yang menemukan bahwa konstruksi framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dalam menelaah konten berita yang disampaikan wartawan Republika Online sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan (Kamil, 2020)

Riset berikutnya mengenai Analisis Framing Pemberitaan 10 Tahun Jokowi Dalam Media Online Antaranews.Com Dan Tempo.Co dengan menggunakan metode analisa framing Robert N Entman yang menemukan konstruksi framing pemberitaan yang digunakan oleh media Antaranews.com lebih halus dibanding Tempo.Co (Marwanto et.al, 2024).

Teori konstruksi sosial merupakan salah satu teori yang digunakan dalam metode analisis *framing*. Teori ini membahas tentang proses pembentukan sebuah realitas sosial sehingga memiliki sebuah makna. Istilah konstruksi sosial atas realitas (*social construction of reality*), menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melalui bukunya yang berjudul “*The Social Construction of Reality, a Treatise in the Sociological of Knowledge*” (1966). Ia menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, yang mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif (Bungin, 2011).

Konstruksi realitas sosial adalah sebuah teori yang diciptakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Teori ini berpandangan bahwa realitas memiliki dimensi subjektif dan objektif. Manusia merupakan instrument dalam menciptakan realitas yang objektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana ia memengaruhinya melalui proses internalisasi yang mencerminkan realitas yang subjektif. Dengan demikian, masyarakat sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat, yang keduanya berlangsung secara dialektis, tesis, antithesis dan sintesis. Kedialektisan itu sekaligus menandakan bahwa masyarakat tidak pernah sebagai produk akhir, tetapi sebagai proses yang sedang terbentuk.

Konstruksi sosial berasal dari filsafat konstruktivisme yang dimulai dari pemikiran konstruksi kognitif. Konstruktivisme dijadikan sebuah kerja kognitif individu untuk mengartikan yang terjadi di dunia realitas tentang interaksi antara individu dengan individu lain. Sejauh ini ada tiga macam konstruktivisme (Bungin, 2006).

Konstruktivisme radikal hanya dapat mengakui apa yang dibentuk oleh pikiran manusia. Kaum konstruktivisme radikal mengesampingkan hubungan antara pengetahuan dan kenyataan sebagai suatu kriteria kebenaran. Pengetahuan bagi mereka tidak mereflesikan suatu realitas ontologis objektif, namun sebagai sebuah realitas yang dibentuk oleh pengalaman seseorang. Pengetahuan selalu merupakan konstruksi dari individu yang mengetahui dan tidak dapat ditransfer kepada individu lain yang pasif. Karena itu, konstruksi harus dilakukan sendiri olehnya terhadap pengetahuan itu, sedangkan lingkungan adalah sarana terjadinya konstruksi itu.

Konstruktivisme *realism* hipotesis; dalam pandangan konstruktivisme *realism* hipotesis, pengetahuan adalah sebuah hipotesis dari struktur realitas yang mendekati realitas dan menuju kepada pengetahuan yang hakiki. Dalam bentuk ini mereka mengakui pengetahuan sebagai sebuah hipotesis, lalu mereka membandingkannya dengan segala hipotesis yang melibatkan sebuah realitas sehingga meneguhkan diri mereka menuju pengetahuan yang hakiki.

Konstruktivisme biasa mengambil semua konsekuensi konstruktivisme dan memahami pengetahuan sebagai gambaran dari realitas itu. Kemudian pengetahuan individu dipandang sebagai suatu gambaran yang dibentuk dari realitas objek dalam dirinya. Antara pengetahuan dan pengalaman seseorang mampu menjadi sebuah realitas dari seseorang. Lebih tepatnya pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh pengalaman seseorang dalam realitas tersebut yang mampu membentuk dirinya dalam sebuah lingkungan.

Dari ketiga macam konstruktivisme, terdapat kesamaan, dimana konstruktivisme dilihat sebagai sebuah kerja kognitif individu untuk menafsirkan dunia realitas yang ada, karena terjadi realisasi sosial antara individu dengan lingkungan atau orang disekitarnya. Hal ini menyebabkan individu tersebut membangun tentang pengetahuan atas realitas yang dirasakan dari interaksi tersebut, yang biasa disebut skema/skemata. Konstruktivisme seperti inilah yang oleh Berger dan Luckmann (1990), dikatakan sebagai konstruksi sosial (Bungin, 2006).

Berger dan Luckmann menilai proses mengkonstruksi melalui interaksi sosial yang dialektis dari tiga bentuk realitas, yakni *simbolic reality*, *objective reality*, dan *subjective reality* yang berlangsung dalam suatu proses dalam tiga momen simultan: eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. (Mufid, 2007). Sebagai makhluk yang memiliki pola pemikiran yang tidak terbatas, manusia dapat mengartikan kenyataan yang terjadi dalam kehidupannya. Manusia dapat memaknai potensi dirinya dan objek disekitarnya berdasarkan pengamatan ketika sedang berinteraksi. Proses pemaknaan

tersebut terjadi dari tindakan yang berlangsung secara berulang-ulang. Dari proses ini timbul kesadaran untuk mempersepsikan makna yang terkandung pada objek tersebut. Berger dan Lukermann (1990) mengatakan, terjadi dialektika antara individu yang membentuk masyarakat atau masyarakat yang membentuk individu. Proses dialektika ini berlangsung dalam tiga momen yaitu eksternalisasi (penyesuaian diri), objektiviasi dan internalisasi (Bungin, 2006).

*Pertama*, pada proses eksternalisasi dikatakan bahwa dunia sosiokultural merupakan produk manusia. Dalam eksternalisasi, manusia melakukan tindakan berulang-ulang karena mereka beranggapan hal tersebut dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Eksternalisasi merupakan tahap yang sangat mendasar yang terjadi dari proses interaksi antara individu dengan masyarakat. Demikian halnya ketika seseorang melakukan wawancara. Disana terjadi interaksi antara wartawan dengan narasumber. Realitas yang terbentuk dari wawancara tersebut adalah produk interaksi antara keduanya. Realitas hasil wawancara bukan hasil operan antara apa yang dikatakan narasumber dan ditulis sedemikian rupa kedalam berita. Disana juga ada proses eksternalisasi: pertanyaan yang diajukan dan juga sudut penggambaran yang dibuat oleh pewawancara yang membatasi pandangan narasumber. Belum termasuk bagaimana hubungan dan kedekatan antara wartawan dengan narasumber. Proses dialektis diantara keduanya yang menghasilkan wawancara yang kita baca atau kita lihat di televisi (Eriyanto, 2002).

*Kedua*, tahap objektivasi merupakan hasil dari proses eksternalisasi. Pada tahap ini individu melakukan objektivasi terhadap kondisi produk sosial. Hal ini berlangsung tanpa harus saling berinteraksi, artinya objektivasi dapat terjadi melalui penyebaran opini yang berkembang pada masyarakat tanpa harus terjadi tatap muka antar individu. Hal terpenting dalam objektivasi adalah pembuatan signifikasi, yakni pembuatan tanda-tanda oleh manusia. Berger dan Luckmann dalam Bungin (2006) mengatakan bahwa, sebuah tanda (*sign*) dapat dibedakan dari objektivasi-objektivasi lainnya, karena tujuannya yang eksplisit untuk digunakan sebagai isyarat atau indeks bagi pemaknaan subjektif, maka objektivasi juga dapat digunakan sebagai tanda, meskipun semula tidak dibuat maksud itu. Bahasa merupakan alat simbolis untuk melakukan signifikasi, yang mana logika ditambahkan secara mendasar kepada dunia sosial yang diobjektivasi. Bahasa adalah kegiatan eksternalisasi manusia ketika berhadapan dengan dunia, ia adalah hasil dari kegiatan manusia. Setelah dihasilkan, baik benda maupun bahasa sebagai produk eksternalisasi tersebut menjadi realitas yang objektif (Eriyanto, 2002). Dengan demikian, yang terpenting dalam tahap objektivasi ini adalah melakukan signifikasi, memberi tanda bahasa dan simbolisasi terhadap benda yang disignifikasi, melakukan tipifikasi terhadap kegiatan seseorang yang kemudian menjadi objektivasi linguistik, yaitu pemberian tanda verbal maupun simbolisasi yang kompleks (Bungin, 2006).

*Ketiga*, tahap internalisasi lebih merupakan penyerapan kembali dunia subjektif ke dalam kesadaran sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifkan tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas diluar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi, manusia menjadi hasil dari masyarakat (Bungin, 2006). Disini individu mengidentifikasi dirinya dengan lembaga-lembaga sosial yang telah menjadi tempat terjadinya proses interaksi individu tersebut.

Bagi Berger, realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan (Eriyanto, 2002). Tetapi sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi. Dengan pemahaman semacam ini, realitas berwajah ganda/plural. Setiap orang bisa

mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. Setiap orang yang mempunyai pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu, dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas sosial itu dengan konstruksinya masing-masing.

Selain plural, konstruksi sosial itu juga bersifat dinamis. Sebagai hasil dari konstruksi sosial maka realitas tersebut merupakan realitas subjektif dan realitas objektif sekaligus. Dalam realitas subjektif, realitas tersebut menyangkut makna, interpretasi dan hasil relasi antara individu dan objek. Setiap individu mempunyai latar belakang sejarah, pengetahuan, dan lingkungan yang berbeda-beda yang bisa jadi menghasilkan penafsiran yang berbeda pula ketika melihat dan berhadapan dengan objek. Seseorang akan mencurahkan ketika bersinggungan dengan kenyataan (eksternalisasi), sebaliknya, ia juga akan dipengaruhi oleh kenyataan objektif yang ada (internalisasi) (Eriyanto, 2002).

Setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda atas sebuah realitas. Hal ini juga terjadi kepada para pekerja media yang memiliki pemikiran tersendiri dalam mengkonstruksi peristiwa yang terjadi (realitas) dalam pemberitaannya. Isi sebuah berita merupakan hasil pengamatan peristiwa yang dilakukan oleh para pekerja media. Pada bagian ini konstruksi realitas itu terjadi.

Dalam mengkonstruksi peristiwa para pekerja media menggunakan bahasa dengan sedemikian rupa untuk membentuk konstruksi pemberitaannya. Bahas bukan saja sebagai alat merepresentasikan suatu realitas, tetapi dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan gambaran seperti apa yang diciptakan oleh bahasa tentang realitas tersebut. Oleh sebab itu, media massa mempunyai peluang sangat besar untuk memengaruhi makna dan gambaran yang dihasilkan dari realitas untuk dikonstruksi. Setiap upaya menceritakan sebuah peristiwa, keadaan, benda atau apa pun pada hakikatnya adalah usaha mengkonstruksi realitas (Sobur, 2006).

Substansi teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas Berger dan Luckmann adalah proses simultan yang terjadi secara alamiah melalui bahasa dalam kehidupan sehari-hari pada sebuah komunitas primer dan semi-sekunder (Bungin, 2006). Substansi “teori konstruksi sosial media massa” adalah pada sirkulasi informasi yang cepat dan luas sehingga konstruksi sosial berlangsung dengan sangat cepat dan merata. Realitas yang terkonstruksi itu juga membentuk opini massa, massa cenderung apriori dan opini massa cenderung sinis (Bungin, 2006).

Posisi konstruksi sosial media massa adalah mengoreksi substansi kelemahan dan melengkapi konstruksi sosial atas realitas, dengan menempatkan seluruh kelebihan media massa dan efek media pada keunggulan konstruksi sosial media massa atas konstruksi sosial atas realitas. Namun proses stimultan yang digambarkan diatas tidak bekerja secara tiba-tiba, namun terbentuknya proses tersebut melalui beberapa tahap penting. Dari konten konstruksi sosial media massa, proses kelahiran konstruksi sosial media massa melalui tahap-tahap sebagai berikut: (a) tahap menyiapkan materi konstruksi, (b) tahap sebaran konstruksi, (c) tahap pembentukan konstruksi realitas, dan (d) tahap konfirmasi (Bungin, 2006).

## 2. Metode

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan mencari fakta berdasarkan interpretasi yang tepat. Penelitian ini mempelajari masalah yang terjadi dalam masyarakat dalam situasi tertentu termasuk kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta protes yang sedang berlangsung dalam suatu fenomena. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan model analisis framing yang diperkenalkan oleh Robert M Entman. Subjek penelitian yang dilakukan

oleh peneliti berupa korpus pemberitaan kepemimpinan Jokowi dalam Majalah Tempo Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi 29 Juli - 4 Agustus 2024.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis teks. Analisis digunakan untuk melihat bagaimana suatu peristiwa dipahami dan dibentuk oleh media melalui framing model Robert M Entman . Framing atau pembingkaian berita akan memberi penegasan lebih terhadap teks dan menyampaikan realitas melalui narasi yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan suatu informasi.

Oleh karena itu analisis teks yang akan digunakan oleh peneliti dianggap sangat sesuai jika menggunakan analisis framing model Robert M. Entman untuk melihat strategi Majalah Tempo melakukan framing terkait pemberitaan kepemimpinan Joko Widodo dalam Majalah Tempo Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi 29 Juli – 4 Agustus 2024.

Data utama penelitian ini berasal dari berita kepemimpinan Jokowi yang ditulis dalam Majalah Tempo Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi 29 Juli – 4 Agustus 2024. Terdapat 18 berita atau dalam majalah tersebut disebut 18 dosa Jokowi yang dilakukan selama dua periode atau 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketujuh.

Pemilihan berita yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan metode *Purposive Sampling* atau pengambilan berita yang dilakukan secara sengaja sesuai dengan persyaratan atau kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Adapun kriteria pemilihan berita adalah sebagai berikut: viralnya pemberitaan terkait isu yang diangkat; kelengkapan isu yang di angkat oleh majalah Tempo; mendapatkan perhatian lebih di kalangan masyarakat; memiliki dampak yang besar di kalangan masyarakat. Sehingga dari persyaratan tersebut, peneliti mengerucutkan sampel 12 berita yang akan diteliti. Dua belas berita tersebut akan diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Konten Berita dan Narasumber terkait Pemberitaan Kepemimpinan Jokowi dalam Majalah Tempo (Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi 29 Juli – 4 Agustus 2024)

No	Judul Berita	Konten Berita	Narasumber
1.	Dari Istana untuk Keluarga	<p>Berita ini mengangkat tentang isu tiga periode Jokowi yang dirumuskan dalam 'Lab 45' singkatan dari Laboratorium Indonesia 2045 hingga dinasti politik yang dibentuk oleh Jokowi sebelum masa jabatannya sebagai presiden Republik Indonesia ke tujuh berakhir.</p> <p>Jokowi ingin memperpanjang masa jabatannya karena takut proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) akan mangkrak. Sebelum masa jabatannya berakhir, Jokowi mengusung putranya Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai Walikota Solo pada PILKADA 2020 dan menantunya Bobby Nasution sebagai Walikota Medan.</p> <p>Tak hanya itu, publik juga menyoroti putusan Mahkamah Agung yang memutuskan untuk mengabulkan usia minimal calon presiden dan wakil presiden kala Gibran ingin mencalonkan sebagai Wakil Presiden.</p>	Andi Widjajanto (Mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional), Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Maritim dan Investasi), Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi Indonesia), Joko Widodo (Presiden ke Tujuh Republik Indonesia), Budi Arie Setiadi (Menteri Komunikasi dan Informatika ), Achmad Purnomo (Mantan Wakil Wali Kota Solo 2021), Yoes Kanawas (Peneliti dari Institute for Advanced Research Universitas Katolik Indonesia), Arya Sinulingga (Staff Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara), Tiga narasumber di lingkaran istana, Empat orang dekat keluarga Jokowi, Tiga pejabat BUMN, Tegus Prakosa (Wali Kota Solo), Bobby Nasution (Wali Kota Medan), Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara X.

Tabel 2. Lanjutan

2. Simsalabim Jadi Undang-Undang	Berita ini menjelaskan selama dua periode menjabat sebagai presiden. Joko Widodo mulai mencoba untuk melemahkan Lembaga pengontrol eksekutif. Jokowi juga merancang undang-undang cipta kerja yang disahkan oleh DPR.  Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja berulang kali dibahas sebelum diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) namun Jokowi berkeyakinan jika RUU itu tidak akan ditolak. Selama kepemimpinan Jokowi, DPR seolah tidak pernah menolak tawaran RUU yang diberikan.  Jokowi juga meminta beberapa partai untuk mendukung calon yang diusungnya sehingga kemandirian partai politik mulai melemah.	Masinton Pasaribu (Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Mahfud Md (Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan), Feri Amsari (Pengamat Hukum Tata Negara), Andi Widjajanto (Mantan Sekretaris Kabinet), Yorrys Raweyai (Politikus Senior Partai Golkar), Titi Anggraini (Pengamat Pemilihan Umum), Muhammad Romahurmuziy (Anggota Partai Persatuan Pembangunan), Arya Pernandes (Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies atau CSIS), Melchias Markus Mekeng (Wakil Ketua Umum Golkar), Budi Arie Setiadi (Menteri Komunikasi dan Informatika), Jimly Asshiddiqie (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi).
3. Baju Loreng di Lembaga Sipil	Berita ini menjelaskan dari sisi Militer dimana tentara diberi ruang untuk menduduki sejumlah jabatan sipil. Pemerintah juga mengusulkan untuk penghapusan pasal larangan anggota TNI berbisnis. RUU TNI juga membuka peluang bagi para tentara aktif untuk menduduki banyak jabatan sipil padahal aturan yang berlaku saat ini, tentara hanya diperbolehkan untuk masuk ke sepuluh kementerian dan lembaga.	Tubagus Hasanuddin (Komisi Bidang Pertahanan DPR dari PDI Perjuangan), Andi Widjajanto (Gubernur Lemhasnas), Dua peneliti militer (Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al-Araf dan peneliti Pusat Penelitian Badan dan Keahlian DPR), Laksamana Muda Kresno Buntoro (Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI), Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan), Mahfud Md (Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan), Brigadir Jenderal Andogo Wiradi (Deputi V Bidang Prediksi dan Analisis Informasi Strategis), Septian Hario Seto (Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi), Gina Sabrina (Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia), Mohammad Averrouce (Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB).
4. Panggung Komersialisasi Pendidikan	Berita ini menjelaskan tentang biaya kuliah yang kian hari semakin mahal namun target capaian Pendidikan justru tidak terpenuhi. Jumlah anak yang putus sekolah masih sangat tinggi akibat mahalnya biaya pendidikan. Terlebih lagi, Jokowi mengeluarkan aturan yang mengizinkan komite sekolah untuk memungut biaya demi menutupi kebutuhan operasional sekolah. Praktek komersialisasi juga terlihat ketika pihak sekolah mulai memperjual belikan kuota PPDB berbasis zonasi. Dalam ranah perguruan tinggi, Nadiem hanya mengatur biaya pendidikan untuk kelompok satu dan dua diangka 500 hingga 1 juta rupiah, selebihnya nominal untuk kelompok berikutnya menjadi wewenang kampus.	Nopan Saputra (Salah satu siswa SMP yang putus sekolah), Matinem (Ibu Nopan), Ubaid Matraji (Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia), Almas Sjafrina (Peneliti Indonesia Corruption Watch bidang korupsi pendidikan), Thamrin Kasman (Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan), Afifa (nama samaran seorang siswa yang tak sanggup membayar uang kuliah meski lolos melalui jalur tes), Ahmad Bashri (Kepala Sub-Direktorat Kesejahteraan dan Kewirausahaan Mahasiswa Unesa), Sufini Dasco Ahmad (wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat), Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan), Nadiem (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), Abdul Haris (Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi),
5. Geng Solo di Trunojoyo	Berita ini menyorot pada citra Polri yang anjlok setelah munculnya kasus Sambo dan tragedi Kanjuruhan. Ada tiga aturan yang dibuat untuk mendukung reformasi kultural di Kepolisian. Revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian RI terkait penambahan usia pensiun polisi.	Mohammad Mahfud Md (Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan), Poengky Indarti (Komisioner Kepolisian Nasional), Hussein Ahmad (Peneliti Imparsial), Muhammad Isnur (Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko (Kepala Biro Penerangan Masyarakat).

Tabel 2. Lanjutan

6. Biang Keladi Pelemahan KPK	Berita ini menjelaskan tentang revisi UU KPK sebagai bentuk pelemahan atas kekuasaan hak KPK. Akibatnya, KPK sulit memperkirakan kembali kasus yang menyeret aktor tertinggi seperti kasus Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (WAMENKUMHAM) Edward Omar Sharif Hiarie. Kasus Firli Bahri selaku mantan menteri KPK yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan. Serta kasus pelemahan KPK mulai terasa saat isu kelompok Taliban menyeruak. Puncaknya adalah pemecatan 52 pegawai KPK lewat tes wawasan kebangsaan.	Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK), Rudi Setiawan (Deputi Penindakan KPK), Fitroh Cahyanto (Mantan Direktur Penuntutan KPK), Agus Rahardjo (Ketua KPK 2015-2019), Yudi Purnomo Harahap (Mantan Ketua Wadah Pegawai), Kurnia Ramadhana (Peneliti Indonesia Corruption Watch).
7. Bengkak Utang di Akhir Jabatan	Berita ini melihat isu bengkak utang di akhir jabatan berlandaskan pada rasio utang terhadap PDB dalam sepuluh tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 rasio utang terhadap produk domestic bruto meningkat hingga 9,14 persen akibat tingginya kebutuhan pembiayaan program penanganan Covid-19. Terlebih lagi nilai utang jatuh tempo pemerintah pada 2025 akan mencapai 800,33 triliun. Kenaikan utang tersebut dipengaruhi karena kendornya pengawasan DPR pada program kerja Jokowi. Hal ini dilihat dari beberapa program kerja Jokowi yang disetujui tanpa adanya pembahasan lanjut.	Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Andry Asmoro (Kepala Ekonom Bank Mandiri), Septian Hario Seto (Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi), Wijayanto Samirin (Kepala Penasehat Paramadina <i>Public Policy Institute</i> ), Abdul Manap Pulungan (Peneliti <i>Institute for Development of Economics and Finance</i> ), Misbach Hasan (Sekretaris Jenderal Forum Indonesia), Andry Asmoro (Kepala Ekonom Bank Mandiri).
8. Mahal Hasrat Sepur Kilat	Berita ini menyorot pada kejanggalan dalam proyek kereta Whoosh yang terus membebani anggaran. Whoosh turut membebani keuangan perusahaan dengan total kerugian 7,12 triliun pada 2023. Proyek Whoosh digarap dengan skema potongan 40 persen modal dari China dan 60 persen modal dari Indonesia. Kereta ini direncanakan rampung pada 2019 namun tak kunjung selesai. Melarnya waktu penggeraan membuat utang investasi membengkak hingga Rp 117 triliun. Pembengkakkan terjadi akibat pembebasan lahan yang sebelumnya tidak diperhitungkan, pandemi Covid-19 menyebabkan biaya konstruksi naik, masalah geologis dan perubahan desain.	Kartika Wirjoatmodjo (Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara), Agung Budi Waskito (Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA), Eva Chairunisa (Sekretaris Perusahaan KCIC), Arya Sinulingga (Staf Khusus Menteri BUMN), Dwiyana Slamet Riyadi (Direktur Utama KCIC), Sunanto (Direktur Next Policy Yusuf).
9. Ambisi di Kota Nusantara	Berita ini melihat pada pembangunan IKN yang membutuhkan biaya sekitar Rp 466 triliun. Dari total tersebut post anggaran pendapatan dan belanja negara sebanyak Rp 90,4 triliun atau sekitar 19,29 persen. Pegawai negeri akan dipindahkan secara bertahap sesuai ketersediaan hunian. Mereka juga dijanjikan akan mendapat insentif.	Bhima Yudhistira (Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies), Mohammad Avverouche (Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), Septian Hario Seto (Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi), Imam Santoso Ernawi (Ketua Satuan Tugas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN), Bima (Pegawai Negeri Kementerian Koordinator), Susi (Aparatur Sipil Negara di Kementerian), Christian Samosir (Staf Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), Anton Rumanto (Pegawai Kantor Badan Pengawasan Tenaga Nuklir).
10. Defortasi Lumbung Pangan dan Lubang Tambang	Berita ini membahas tentang deforestasi atau penebangan hutan seluas 4,37 hektare untuk dijadikan perkebunan tebu, pabrik gula dan bioethanol. Deforestasi di Papua Selatan selama sembilan tahun kepemimpinan Jokowi mencapai 107 ribu hektare. Satu dekade kepemimpinan Jokowi banyak membangun proyek lumbung pangan atau <i>Food Estate</i> . Namun mengalami kegagalan panen dan mangkrak. Selama sepuluh tahun terakhir, kebijakan Jokowi telah memicu deforestasi hutan alam lebih dari 4 juta hektare.	Ambrosius Zohe Mahuze (Ketua Adat Suku Malind Anim), Franky Samperente (Direktur Yayasan Pusaka Bentala Rakyat), Sapta Ananda Proklamasi (Peneliti Senior Data dan Sistem Informasi Geografi Greenpeace Indonesia), Petrus Assem (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua Selatan), Nadia Hadad (Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan), Saharuddin (Seorang Warga Morowali), Timer Manurung (Ketua Yayasan Auriga Nusantara), Susiwijono Moegiarso (Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian).

Tabel 2. Lanjutan.

11. Bara Konflik Agraria Proyek Strategis Nasional	Berita ini menjelaskan tentang salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu Rempang Eco-City yang menargetkan lima kampung untuk dikosongkan. Berdasarkan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam jangka waktu 2020-2023 tercatat ada 115 konflik PSN yang melibatkan 82.533 keluarga. Terlebih lagi, dari 961 keluarga hanya 100 keluarga yang setuju untuk pindah. Rempang Eco-City dianggap sebagai perampasan hak yang berdalih atas tidak adanya bukti kepemilikan.	Dian (Seorang Ibu-ibu warga Sembulang Hulu), Benni Wijaya (Kepala Departemen Kampanye dan Manajemen Pengetahuan KPA), Erasmus Cahyadi (Ketua Deputi II Bidang Politik dan Advokasi Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Djoko Wibowo (Koordinator Sektor Transportasi dan Pembiayaan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Wiharto (Mantan Kepala Dukuh Kraton II), Yuyun Waryunaningsih (Pejabat Pengganti Sementara Sekretaris Perusahaan PT Angkasa Pura I), Eko Cahyono (Pelatih Senior dari Sajogyo Institute).
12. Tawanan Proyek Strategis Nasional	Berita ini masih menyorot pada PSN namun dilokasi berbeda yaitu Poco Leok yang direncanakan sebagai tempat pengembangan pembangkit listrik. Alasan penolakan ini didasari pada keterkaitan ruang hidup manusia yang mencakup lima komponen. Pengeboran panas bumi yang berada di 60 titik dekat dengan pemukiman warga membuat warga setempat melakukan penolakan sebanyak 22 kali yang berujung pada panggilan kepolisian hingga pemukulan.	Ponsianus (Warga Poco Leok), Kampianus Jebaru (Salah satu korban), Aunillah (Guru Mengaji Pondok Barkatal Ad'iya di Batukuwung), Doif (Tokoh Masyarakat Padarincang), Muhammad Isnur (Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Hans Giovanny Yosua (Peneliti Kontras), Anis Hidayah (Komisioner Komisi Nasional HAM), Susiwijono Moegiarso (Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian), Nia (Seorang warga Pulau Rempang), Wadi (Warga Rempang), Aminuddin (Warga Rempang).

Peneliti melakukan pengumpulan data sebagai langkah awal dalam proses penelitian. Setelah data berberita terkait dosa Jokowi yang tertera dalam Majalah Tempo Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi yang berjudul Nawadosa Jokowi terkumpul maka peneliti akan melakukan analisis framing model Robert M. Entman.

Analisis framing model Robert M. Entman yang akan digunakan oleh peneliti melihat dari empat aspek yaitu; *Define problem* (pendefinisian masalah) tahap ini akan digunakan oleh peneliti untuk melihat interpretasi yang dipahami oleh pihak redaksi Majalah Tempo terkait masalah yang sedang diangkat. *Diagnoses causes* (memperkirakan masalah atau sumber masalah) proses ini melihat bagaimana redaksi menonjolkan sesuatu yang dianggap sebagai penyebab masalah. *Make moral judgement* (membuat keputusan moral) pada tahapan ini peneliti akan mengidentifikasi penyebab masalah yang kemudian dipertegas dengan gagasan lain. Tahap terakhir, *Treatment recommendation* (menekankan penyelesaian) yaitu sikap redaksi dalam mengambil keberpihakan terhadap isu yang diangkat. Solusi yang diberikan tentu akan bergantung pada pendefinisian masalah, penyebab masalah dan gagasan yang mempertegas masalah tersebut.

### 3. Hasil Penelitian

Jenis berita yang disajikan Tempo pada edisi khusus 10 tahun Jokowi yang berjudul Nawadosa Jokowi menggunakan jenis berita *hard news* dengan mengadopsi peliputan investigasi yang mendalam dan tersembunyi, mengungkap fakta yang tersembunyi dan memiliki dampak yang signifikan. Hasil penelitian mengungkap bahwa dapur redaksi Tempo mempersepsi framing negatif pada pemberitaan kepemimpinan Jokowi edisi khusus 10 tahun Jokowi didukung oleh *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (sumber masalah), *make moral judgement* (membuat keputusan moral) dan *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian).

Dalam penulisannya Majalah Tempo mendefinisikan permasalahan utama (*define problems*) ditekankan pada kekuasaan yang berlebihan, gejala melemahnya institusi demokrasi serta pembangunan proyek tanpa pertimbangan yang matang. Namun dari beragamnya isu yang diangkat, peneliti melihat daya tarik pemberitaan ada pada dua hal.

Pertama, kekuasaan yang berlebihan. Kedua, pembangunan proyek tanpa pertimbangan yang matang.

Kekuasaan berlebihan dapat dilihat pada dua berita yang dicantumkan dalam Majalah Tempo berjudul “Dari Istana Untuk Keluarga” dan “Simsalabim Jadi Undang-Undang”. Berita pertama menyoroti keinginan Jokowi dalam memperpanjang masa jabatannya melalui pembentukan sebuah tim analisis yang dinamai Kajian Laboratorium 45 (Kajian Lab 45). Tim tersebut bertujuan membantu menganalisis peluang yang memungkinkan terlaksananya keinginan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan. Berita kedua masih membahas terkait kekuasaan Jokowi namun menekankan pada beberapa penyimpangan yang dilakukan untuk menyongsong anaknya (Gibran Rakabuming Raka) juga menantunya (Bobby Nasution) agar mampu terjun ke dunia politik.

Majalah Tempo juga mengarahkan pemberitaannya pada proyek besar yang dilakukan berlandaskan ambisi politik tanpa pertimbangan yang matang. Proyek besar yang dimaksud yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara, Proyek Kereta Cepat atau Whoosh dan Proyek Strategis Nasional yang terjadi dibeberapa titik. Berdasarkan temuan data penelitian, peneliti menemukan Majalah Tempo menuliskan berbagai hambatan dari segi anggaran dan kerugian yang dialami oleh warga dan negara atas adanya proyek-proyek tersebut. Salah satunya terdapat pada penolakan warga dalam Proyek Strategis Nasional di Rempang Eco-City yang mengosongkan lima kampung pemukiman warga sebagai tempat dilakukannya PSN. Tak hanya itu, peneliti juga melihat jika pengadaan kereta Whoosh justru menjadi beban baru bagi anggaran negara. Terlebih lagi keinginan untuk pindah ibu kota demi pemerataan penduduk membutuhkan biaya yang cukup besar.

Selain itu, peneliti melihat Majalah Tempo menguraikan satu persatu sumber masalah (*diagnose causes*) pada setiap isu yang ditulis seperti pada kekhawatiran Jokowi akan mangkraknya pembangunan IKN menjadi alasan utama munculnya ide perpanjangan jabatan. Peneliti melihat alasan ini terkesan tidak memberi kepercayaan pada pemimpin berikutnya untuk membangun proyek tersebut. Kekuasaan Jokowi dinilai terlalu berlebihan sehingga mampu membuat beberapa Revisi Undang-Undang yang ia ajukan langsung disetujui tanpa pembahasan yang panjang seperti RUU Cipta Kerja.

Peneliti juga melihat akar permasalahan yang dinarasikan oleh Majalah Tempo mengandung unsur keberpihakan. Dalam kasus pembangunan IKN dan pengadaan kereta cepat atau whoosh, Majalah Tempo membingkai akar masalah berpacu pada anggaran yang membengkak akibat kurangnya investasi dari luar sehingga proyek tersebut hanya menambah beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Peneliti tidak melihat adanya pbenaran atas hadirnya proyek besar ataupun narasi yang mendukung proyek tersebut. Sebaliknya, Majalah Tempo justru menambahkan akar masalah baru pada Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terjadi dibeberapa titik seperti penolakan yang dilakukan oleh warga Sembulang Hulu yang menjadi korban penggusuran demi terlaksananya proyek Rempang Eco-City.

Selain itu, Majalah Tempo menuliskan nilai moral (*make moral judgement*) dengan narasi yang mampu menarik simpati para pembaca. Pesan moral menjadi hal penting dalam suatu berita dan berpengaruh pada cara berita diterima oleh pembaca. Tak heran jika pada isu Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City, Majalah Tempo menuliskan kesedihan yang diselimuti tangis sedih dari warga melihat rumahnya harus dibongkar secara paksa.

Selain itu, dalam isu terkait dinasti politik Majalah Tempo tidak ragu menggambarkan praktik tersebut sebagai bentuk kemunduran demokrasi. Keterlibatan

anak dan menantu Jokowi bukan sebagai bentuk regenerasi politik yang sehat melainkan sebagai suatu upaya sistematis yang mencederai moral etika kepemimpinan. Narasi yang disusun oleh Majalah Tempo berhasil menggambarkan Jokowi bukan hanya sebagai pemimpin rakyat yang sederhana melainkan simbol kekuasaan yang aktif merancang kesinambungan politik didalam keluarganya.

Terakhir, Majalah Tempo menuliskan penyelesaian (*treatment recommendation*) terkait masalah dari setiap isu yang ditulis berisi solusi untuk jangka panjang dan jangka pendek. Dengan demikian, Majalah Tempo tidak hanya sebagai media pengawas melainkan ikut serta dalam menyumbang arah perubahan kebijakan publik. Contohnya, pada isu komersialisasi pendidikan.

Peneliti menemukan adanya kalimat penengah yang meluruskan berita tersebut. Hal ini diperkuat pada salah satu temuan data yang peneliti cantumkan pada bagian *treatment recommendation* dalam berita yang berjudul “Panggung Komersialisasi Pendidikan”. Majalah Tempo mengkritisi kenaikan biaya pendidikan yang terbilang drastis dan berdampak bagi masyarakat kurang mampu. Meski demikian, pihak Majalah Tempo tetap menuliskan upaya yang dilakukan pemerintah seperti mengundang para rektor untuk berdiskusi walaupun pada akhirnya kebijakan tersebut tidak dicabut secara menyeluruh.

Lebih lanjut, hasil framing secara komprehensif bisa dilihat pada tabel tiga yang tercantum di bawah ini.

Tabel 3. Hasil Framing Pemberitaan Kepemimpinan  
Majalah Tempo Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi (29 Juli – 4 Agustus 2024)

Judul Berita	Define Problems	Diagnose Causes	Moral Judgement	Reccomendation
Dari Istana Untuk Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>a.Pembentukan Kajian Lab 45 untuk merencanakan perpanjangan jabatan Jokowi.</li> <li>b.Upaya perpanjangan masa jabatan melalui penundaan pemilu.</li> <li>c.Jokowi mulai memupuk dinasti politik dalam keluarganya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a.Kekhawatiran Jokowi atas mangkraknya proyek IKN Ketika masa jabatannya habis.</li> <li>b.Segala usaha Jokowi kerahkan dalam menyongsong anaknya Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon Wali Kota Solo.</li> <li>c. Mulai mencari lawan agar kemenangan anaknya terlihat sah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a.Jokowi melobi DPR dan MPR.</li> <li>b.Keinginan untuk memperpanjang masa jabatan dan membangun dinasti politik membuat publik berpandangan negatif.</li> <li>c. Jokowi dinilai berpengaruh dalam mengubah keseimbangan peristiwa pemilu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a.Jokowi menyangkal isu-isu yang beredar.</li> <li>b.Seorang Menteri Komunikasi dan Informatika juga membantah isu tersebut.</li> </ul>
Simsalabim Jadi Undang-Undang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a.Jokowi membahas RUU Cipta Kerja Bersama Mahfud dengan keyakinan kuat akan diterima.</li> <li>b.Selain melemahkan DPR melalui RUU Cipta Kerja, Jokowi juga melemahkan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 9.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a.RUU Cipta Kerja merupakan permintaan dari istana</li> <li>b.Jokowi juga merevisi RUU IKN dan mengubah status IKN menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) serta mendapat anggaran dari APBN.</li> <li>c.Putusan Nomor 90 membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden.</li> <li>d.Upaya pelehanan MK pertama kali terjadi pada kasus Setia Novanto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a.Sejumlah RUU yang diajukan tidak dibahas panjang.</li> <li>b.Citra DPR ikut tercoreng hingga mendapat label hanya sebagai tukang stempel.</li> <li>c.Kemandirian partai politik ikut melemah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Budi Arie Setiadi selaku Menteri Komunikasi dan Informatika membantah jika Jokowi disebut melemahkan MK dan KPK.</li> </ul>
Baju Loreng di Lembaga Sipil	<ul style="list-style-type: none"> <li>a.Revisi RUU No. 34 tahun 2024 tentang TNI telah dibahas sejak lima tahun yang lalu.</li> <li>b.Pemerintah mengusulkan penghapusan larangan TNI dalam berbisnis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a.Situasi politik yang kian berubah memengaruhi RUU TNI.</li> <li>b.Keterlibatan TNI dalam ranah sipil tidak sepenuhnya berdampak seperti program cetak sawah yang tidak berkelanjutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ide penempatan TNI di ranah sipil bukan menjadi solusi yang efektif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a.Jokowi enggan berkomentar lebih lanjut terkait revisi RUU TNI.</li> <li>b.Kepala Biro, Data, Komunikasi dan Informasi menjelaskan penempatan tentara pada jabatan sipil disesuaikan dengan kebutuhan</li> </ul>

c.Mengizinkan  
personel militer  
menempati posisi  
sipil.

Tabel 3. Lanjutan.

Panggung Komersialisasi Pendidikan	a.Angka putus sekolah yang sangat tinggi. b.Jumlah anak putus sekolah meningkat hingga 72 ribu orang.	a.Meningkatnya angka putus sekolah dikarenakan tidak tersedianya pendidikan dasar yang bebas biaya. b.Terbitnya aturan yang mengizinkan komite sekolah menarik sumbangan untuk menutupi kebutuhan operasional sekolah.  c.Kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk dana BOS.	a.Banyak anak yang putus sekolah atau mundur akibat biaya. b.Pendidikan lebih mengarah pada komersialisasi dan liberalisasi hingga dianggap sebagai ladang bisnis	a.Para rektor dikumpulkan untuk membahas biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT)  b.Kenaikan UKT dibatalkan namun aturan Menteri tetap berjalan.  c.Perguruan tinggi yang berstatus PTNBH diberikan keleluasaan untuk mengelola keuangan dan mencari pendapatan dari mahasiswa.
Geng Solo di Trunojoyo	a.Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.  b.Tragedi stadion Kanjuruhan yang menelan banyak korban	a.Kasus pembunuhan Brigadir Yosua melibatkan seorang Jenderal Ferdy Sambo membuat banyak pihak ragu untuk memberikan kesaksian.  b.Tragedi Kanjuruhan terjadi akibat ricuhnya supporter masing-masing tim.	a.Kasus yang menyeret seorang jenderal jadi hal pertama yang terjadi dalam sejarah kepolisian.  b. Kepercayaan publik terhadap Polri semakin berkurang.	Ferdy Sambo dan Teddy dijatuhi hukuman seumur hidup.
Biang Keladi Pelemahan KPK	Di dalam ruang lingkup KPK terjadi keberpihakan yang bertolak belakang antara pimpinan KPK dan para pegawai	Masalah loyalitas menghambat proses penanganan perkara. Pegawai komisi anti rasuah tidak segan untuk menolak permintaan pimpinan KPK.	Melemahnya cengkraman pimpinan KPK justru membuat proses penyelidikan dan penyidikan jadi karut marut	Jokowi mengabaikan saran dari 50 tokoh untuk membuat peraturan pemerintah pengganti Undang-undang hingga Revisi Undang-Undang KPK disahkan oleh DPR.
Bengkak Utang di Akhir Jabatan	a.Rasio kenaikan utang terus meningkat terutama pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 9,14 persen.  b.Jumlah utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp 800,31 triliun.	a.Rasio utang yang fantastis naik secara bertahap.  b.Rasio utang juga berdampak pada pendapatan ekspor atau <i>debt service ratio</i> (DSR) hingga 17 persen.  c.Kenaikan utang paling banyak disumbang oleh Kementerian Pertahanan untuk membeli pesenjataan.	Anggaran terperosok, pengawasan BPK dan DPR juga makin kendor.	a.Kinerja Jokowi selama menjabat menghasilkan dua kali lipat pembangunan jalan tol dibandingkan dengan empat presiden sebelumnya.  b.Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Septian Hario menilai beberapa proyek dilakukan tanpa studi kelayakan dan mitigasi resiko.
Mahal Hasrat Sepur Kilat	a.Proyek kereta cepat atau Whoosh menelan dana awal sebesar Rp 108 triliun.  b.Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Bersama Wakil Menteri BUMN dan Direktur Kereta Cepat Indonesia China bertemu untuk mengevaluasi kinerja sekarang.	a.Pengadaan kereta cepat menjadi beban baru bagi WIKA.  b.WIKA mengeluarkan setidaknya Rp 6,1 triliun untuk anggaran modal awal.  c.Biaya investasi kemudian membengkak karena perubahan konstruksi dibeberapa Lokasi.  d.Pembengkakan anggaran disebabkan oleh beberapa faktor seperti pembebasan lahan, pandemi Covid-19. Tekstur tanah hingga perubahan desain	Proyek Whoosh menjadi pelajaran bagaimana ambisi politik hanya menjadi suatu kegagalan jika dilakukan tanpa perencanaan yang matang.	Pemerintah disarankan untuk mengembangkan kawasan berbasis transit atau layanan komersial lainnya.

Tabel 3. Lanjutan.

Ambisi di Kota Nusantara	a.Padatnya ibu kota Jakarta menjadi alasan munculnya ide pemindahan ibu kota.  b.Dana yang digunakan dalam membangun IKN untuk jangka menengah sebesar Rp 466 triliun.  c.Pemerintah mengharapkan adanya kerja sama berupa bantuan dana dari badan usaha swasta.	a.Sejak tahun 2022 pemakaian biaya untuk pembangunan IKN sebesar Rp 72,3 triliun yang bersumber dari APBN.  b.Pembangunan IKN sepenuhnya menggunakan APBN dan investasi tak kunjung masuk.	Pemerintah gagal merealisasikan rencana awal untuk menggunakan APBN dengan jumlah yang sedikit	a.Pegawai negeri akan dipindahkan ke IKN secara bertahap tergantung ketersediaan hunian.  b.Mereka yang bersedia pindah diiming-imingi insentif pionir
Defortasi Lumbung Pangan dan Lubang Tambang	Proses pemerintah dalam membuat PSN berupa penghiliran perkebunan tebu, pabrik gula dan bioethanol.	a.Beberapa warga menolak PSN karena uang ganti rugi terhadap lahan mereka tidak sesuai dengan yang mereka harapkan.  b.Luas deforestasi yang dilakukan Jokowi selama sembilan tahun menjelat mencapai 107 ribu hektare.  c.Selain itu, dampak dari PLTU mengeluarkan debu yang bertebaran di rumah warga.	Kawasan tersebut kini terlihat menyediakan dengan hutan yang dikupas dan bukit yang diratakan	Pemerintah menanggapi persoalan tersebut dengan menjamin telah melakukan mitigasi, verifikasi dan evaluasi menyeluruh untuk mencegah kerusakan lingkungan.
Bara Konflik Agraria Proyek Strategis Nasional	a.Salah satu Proyek Strategis Nasional yaitu Rempang Eco-City menargetkan lima kampung dikosongkan.  b.Berdasarkan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam jangka waktu 2020-2023 tercatat ada 115 konflik PSN yang melibatkan 82.533 keluarga.	a.Dari 961 keluarga Rempang hanya 100 keluarga yang setuju untuk pindah.  b.Rempang Eco-City dianggap sebagai perampasan hak yang berdalih atas tidak adanya bukti kepemilikan tanah.	Suasana penggusuran diselimuti kedepidan melihat rumah dibongkar secara paksa.	a.PT Angkasa Pura I memberi penawaran untuk menyediakan pekerjaan bagi warga yang tergusur.  b.Para warga juga ditawarkan untuk diberikan biaya ganti rugi diluar biaya pindah dan alih profesi.
Tawanan Proyek Strategis Nasional	Penolakan yang dilakukan seorang warga Poco Leok Bernama Pontasianus atas rencana pengembangan pembangkit listrik. Alasan penolakan didasari pada keterkaitan ruang hidup manusia yang mencakup lima komponen.	a.Pengeboran panas bumi berada di 60 titik dekat dengan pemukiman warga.  b.Warga setempat telah melakukan penolakan sebanyak 22 kali berujung pada panggilan kepolisian hingga pemukulan	Laporan bertajuk Atas Nama Proyek Strategis Nasional: Hidup Dirampas, Masyarakat Tertindas mencatat setidaknya ada 79 dugaan pelanggaran HAM selama 2019-2023	Masyarakat menolak beberapa proyek selain PSN. Penolakan tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam proses penyelesaian proyek

#### 4. Pembahasan

Majalah Tempo Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi 29 Juli – 4 Agustus 2024 menyajikan 18 berita terkait kepemimpinan Jokowi yang disebut sebagai “Nawadosa Jokowi”. Dari 18 berita tersebut, peneliti mengambil 12 berita berdasarkan kriteria

pemilihan berita yang telah ditentukan sebelum peneliti memulai penelitian ini. Dua belas berita tersebut menjelaskan isu yang berbeda-beda.

Berdasarkan hasil temuan data, peneliti menemukan cara penyajian data dari Majalah Tempo menjadi kunci keberanian mereka dalam menuliskan narasi pemberitaan yang penuh analisis dan kritis sehingga menjadi suatu pesan yang berpengaruh atau berdampak. Selain menyampaikan hasil realitas lapangan, Majalah Tempo juga menyisipkan kutipan langsung, angka serta kutipan wawancara dengan narasumber yang kredibel atau yang sesuai dengan isu yang sedang digarap.

Salah satu bentuk pemanfaatan data yang mencolok terlihat dalam pemberitaan utang negara yang berjudul “Bengkak Utang di Akhir Jabatan”. Majalah Tempo menyajikan angka-angka spesifik seperti rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat hingga 38,64 persen, serta utang jatuh tempo sebesar Rp 800,31 triliun. Data ini menjadi pengaruh besar bagi pandangan pembaca untuk menunjukkan kenaikan utang yang cukup signifikan sehingga pembaca mampu melakukan perbandingan.

Selain data berupa angka, Peneliti melihat bahwa Majalah Tempo juga memanfaatkan data hukum dan politik untuk memperkuat kritiknya terhadap proses legalisasi yang terburu-buru. Seperti dalam berita terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dan UU TNI. Tulisan tersebut tidak hanya membingkai persoalan sebagai keputusan politik semata, melainkan ikut serta melakukan kerja jurnalistik berbasis riset yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penggunaan data geografis dan ekologis dapat dilihat dalam pemberitaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua dan Sulawesi. Luas deforestasi yang mencapai 107 ribu hektare serta penurunan kualitas lingkungan di kawasan industri dijadikan rujukan utama untuk membangun narasi krisis ekologis. Majalah Tempo turut serta menyajikan hasil riset dari lembaga lingkungan pada narasi pemberitaannya.

Pemberitaan tak hanya terbatas pada penyampaian fakta lapangan melainkan representasi dari suatu realitas yang disampaikan dengan narasi tertentu. Media mengambil peran penting dalam mengkonstruksi realitas sosial sebelum akhirnya dipublikasikan. Karakteristik pada setiap media dapat dilihat dari cara suatu media melakukan pembingkaian atau *framing* pada pemberitaannya.

Robert M. Entman mengemukakan bahwa *framing* melibatkan empat elemen utama yaitu *define problems* (Pendefinisian Masalah), *diagnose causes* (memperkirakan masalah atau sumber masalah), *make moral judgement* (membuat Keputusan moral) dan *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian). Elemen tersebut menjadi pendekatan yang dilakukan media sehingga berita yang disampaikan tidak sekedar melaporkan peristiwa melainkan mampu memberi gambaran terhadap suatu realitas.

Kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun lamanya dimulai dengan kesedaranhanan yang menjadi citra tersendiri bagi presiden ketujuh Republik Indonesia tersebut. Namun, kecenderungan yang kontras terlihat ketika sisi negatif dari kepemimpinan Jokowi mulai marak diberitakan. Majalah Tempo salah satu media yang ikut serta menuliskan hal tersebut dalam edisi khusus yang berjudul “Nawadosa Jokowi” edisi 10 tahun Jokowi.

Peneliti melihat bahwa Majalah Tempo memfokuskan perhatiannya pada isu-isu besar yang berkaitan dengan konsolidasi kekuasaan Jokowi, pelemahan lembaga demokrasi, proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Whoosh, komersialisasi pendidikan serta konflik agraria akibat Proyek Strategis Nasional (PSN). Isu tersebut merupakan hal yang paling marak diperbincangkan oleh masyarakat dan memiliki dampak bagi keberlangsungan hidup masyarakat serta pendirian suatu negara. Hal ini

pun direpresentasikan dalam dua belas berita pada Majalah Tempo Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi yang menjadi objek penelitian peneliti.

Majalah Tempo Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi 29 Juli – 4 Agustus 2024 dalam penulisannya membingkai isu nasional yang terjadi selama kepemimpinan Jokowi dengan sangat kritis. Peneliti menemukan dalam dua belas berita yang dianalisis, Majalah Tempo sebagai media cenderung mengambil posisi keberpihakan pada nilai-nilai demokrasi sehingga arah narasi pemberitaan menimbulkan persepsi negatif bagi pembaca terhadap kinerja Jokowi selama 10 tahun lamanya.

Keberpihakan pada nilai-nilai demokrasi yang dimaksud dilihat pada pemberitaan yang berani dalam mengkritisi kebijakan pemerintah, mengungkap penyimpangan kekuasaan, serta menyoroti persoalan publik yang berkaitan dengan keadilan masyarakat. Dalam konteks ini, Majalah Tempo Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi menunjukkan keberpihakan tersebut melalui pemberitaan yang kritis terhadap berbagai isu nasional sepanjang dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sikap ini mencerminkan keberpihakan pada nilai-nilai demokrasi itu sendiri, yakni menjaga ruang publik tetap terbuka bagi kritik, menjamin partisipasi warga, dan menuntut tanggung jawab dari para pemegang kekuasaan.

Peneliti melihat pihak Majalah Tempo beberapa kali menyampaikan pesan tersirat terkait evaluasi yang harus dilakukan pemerintah agar tidak menambah kerugian bagi negara. Seperti pada isu proyek pembangunan IKN dan Whoosh yang menyoroti perlunya evaluasi proyek secara transparan sebelum dilanjutkan.

Penulis melihat framing yang dilakukan oleh Majalah Tempo juga bersesuaian dengan teori konstruksi realitas sosial khususnya pada konstruktivisme biasa. Hal ini didasari pada realitas yang ditulis dalam Majalah Tempo yang mampu membentuk gambaran dari suatu objek realitas. Pengalaman reporter menjadi sumber pengetahuan bagi pembaca. Seperti pada berita yang dituliskan dalam isu Dari Istana untuk Keluarga. Pengalaman reporter dalam melakukan wawancara mampu digambarkan secara rinci dalam tulisan yang dibuat. Dengan demikian hasil penggambaran tersebut menjadi pengetahuan baru yang diyakini oleh para pembaca.

Majalah Tempo sebagai media mampu memperlihatkan kekuatan konstruksi media dapat menjadi alat untuk menyoroti ketimpangan kekuasaan hingga menjadi suara yang mewakili masyarakat yang terpinggirkan akibat pembangunan. Kekuatan media dalam membingkai realitas berlandaskan pada etika media yang menjadi pilar utama. Narasi yang ditulis tidak jatuh pada manipulasi informasi atau keberpihakan yang menyesatkan pembaca. Dalam Majalah Tempo Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi 29 Juli – 4 Agustus 2025 framing digunakan berdasarkan data yang faktual sehingga isi suatu berita tidak hanya menggiring opini melainkan kebenaran yang bersifat kritis.

## 5. Simpulan

Pembingkaihan berita memiliki kekuatan besar dalam membentuk dan mengonstruksi realitas sosial yang diterima oleh publik. Media memiliki kekuatan untuk menyusun narasi berdasarkan kepentingan, nilai dan sudut pandang tertentu. Proses framing merupakan bentuk konstruksi makna yang disusun secara sistematis melalui berbagai mekanisme simbolik dan bahasa jurnalistik. Majalah Tempo dalam terbitan Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi mencantumkan data berupa angka, kutipan wawancara dan fakta lapangan yang menjadi penguatan atas berita yang ditulis. Majalah Tempo dalam terbitan Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi melakukan framing yang berpihak pada nilai demokrasi sehingga hasil tulisannya mengajak pembaca untuk berpikir kritis hingga

mampu menimbulkan persepsi negatif terkait kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun. Hal ini diamati dengan menelaah dua belas berita yang mengangkat isu sensitif berupa kesalahan-kesalahan yang terjadi selama era pemerintahan Jokowi.

Penelitian di masa mendatang harus menggabungkan dengan studi audiens untuk memahami pengaruh pemberitaan terhadap opini publik dan menjelaskan efek peningkatan fokus pada politik dan presiden terhadap penalaran audiens berdasarkan ideologi politik dan identitas partisan serta implikasi sosialnya

## Referensi

- Andrearini, P. (2024, Januari 24). Anggaran Pendidikan Terus Naik, tapi Skor PISA di Era Jokowi Malah Makin Merosot. *Kumparan.com*. Dikutip melalui <https://kumparan.com/kumparannews/anggaran-pendidikan-terus-naik-tapi-skor-pisa-di-era-jokowi-malah-makin-merosot-221Sux58jfG/full>.
- Aranditio, S. (2024, Juni 22). Citra Positif Jokowi berkat Bansos, Bukan Prestasi. *Kompas.id*. Dikutip melalui <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/06/21/citra-positif-pemerintahan-jokowi-berkat-bansos-bukan-prestasi>.
- Bungin, B. (2006). *Sosiologi Komunikasi Massa: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bungin, B. (2011). *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter L. Breger & Tomas Luckmann*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Dewi, S. (2024, Agustus 7). Majalah Tempo Edisi 10 Tahun Jokowi Hilang di Pasar, Ada yang Borong?. *IDN Times*. Dikutip melalui <https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/majalah-tempo-edisi-10-tahun-jokowi-hilang-di-pasar-ada-yang-borong?page=all>.
- Dwih dan Mulyawan, A. (2024, Oktober 12). Pemerataan dan Perkembangan Pesat Infrastruktur. *Kompas.com*. Dikutip melalui <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/12>.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Firmansyah, M.J. (2022, September 29). Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan. *Tempo.co*. Dikutip melalui <https://www.tempo.co/hukum/jokowi-tetap-inginkan-pembangunan-infrastruktur-terus-berjalan-282149>.
- Gunanto, A.A. (2024, Oktober 15). 1 Dekade Utang Pemerintah Era Jokowi Capai Rp 8.461 Triliun, Melonjak Rp 5.853 T. *Kumparan.com*. Dikutip melalui <https://kumparan.com/kumparanbisnis/1-dekade-utang-pemerintah-era-jokowi-capai-rp-8-461-triliun-melonjak-rp-5-853-t-23imEIShfz0>.
- Hanief, L., & Ainani, M. (2024). Framing analysis of Israel-Palestine conflict news on online media Detik.com and Republika.co.id. *Kajian Jurnalisme*, 8(1), 86–98. <https://doi.org/10.24198/jkj.v8i1.53602>
- Jumadil, D. (2024, Oktober 12). Satu Dekade Presiden Jokowi Bangun 366 Ribu Km Jalan Desa. *Sindonews.com*. Dikutip melalui <https://ekbis.sindonews.com/read/1471547/34/satu-dekade-presiden-jokowi-bangun-366-ribu-km-jalan-desa-1728706206>.
- Kamil, F. (2020). *Analisis Framing Pemberitaan Tiga Tahun Jokowi – JK pada Republika Online*. Skripsi. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.

- Lincoln, Y. S., Lynham, S.A., Guba, E.G. (2018). “Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Confluences, Revisited”. In Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln (Eds.), *Handbook of Qualitative Research* (5th edition), Thousand Oaks: SAGE
- Littlejohn, S.W., Foss, F.A., Oetzel, J.G. (2021). *Theories of Human Communication* (12th ed.), Waveland Press, Inc.
- Majalah Tempo Official Store, (2024, Juli – Oktober). Majalah Tempo Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi ‘Nawadosa’’. Dikutip melalui *marketplace Shopee dan Tokopedia* [https://s.shopee.co.id/30Yo02p6ag?share\\_channel\\_code=1](https://s.shopee.co.id/30Yo02p6ag?share_channel_code=1) dan <https://tokopedia.link/yqOQgn69CQb>.
- Majalah Tempo, *Nawadosa Jokowi Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi, 29 Juli-4 Agustus 2024.*
- Marwanto, G.S., Leliana, I., & Widuhung, M.S. (2024). *Analisis Framing Pemberitaan 10 Tahun Jokowi Dalam Media Online Antaranews.Com dan Tempo.Co*. Dikutip melalui <https://repository.bsi.ac.id/repo/files/441251/download/Jurnal-ANALISIS-FRAMING-PEMBERITAAN-10-TAHUN-JOKOWI-DALAM-MEDIA-ONLINE-ANTARANEWS.COM-DAN-TEMPO.CO.pdf>
- Mast, J., & Temmerman, M. (2021). What’s (the) news? Reassessing “news values” as a concept and methodology in the digital age. *Journalism Studies*, 22(6), 689–701. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2021.1917445>
- Mawardi, I. (2024, Oktober 4). Kepuasan Publik ke Jokowi 75% Versi Survei Indikator, Istana Apresiasi. *Detik.com*. Dikutip melalui <https://news.detik.com/berita/d-7572677/kepuasan-publik-ke-jokowi-75-versi-survei-indikator-istana-apresiasi>.
- Mufid, M. (2007). *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Nugroho, N.P., Adyatama, E., Ristiyanti, J., Fajri, D.A., dan Ryanthie, S. (2025, Januari 6). Jokowi Masuk Nominasi Tokoh Terkorup 2024 Versi OCCRP, Barisan Pendukungnya Berang. *Tempo.co*. Dikutip melalui <https://www.tempo.co/politik/jokowi-masuk-nominasi-tokoh-terkorup-2024-versi-oocrp-barisan-pendukungnya-berang--1190395>.
- Nuraini, F. P., Mulyana, D., & Herawati, M. (2024). Framing analysis of Iran-Israel's 2024 conflict in Kompas.id, Aljazeera.com, and NYTimes.com. *Kajian Jurnalisme*, 8(1), 52–67. <https://doi.org/10.24198/jkj.v8i1.55562>
- Ophir, Y., Forde, D. K., Neurohr, M., Walter, D., & Massignan, V. (2021). News media framing of social protests around racial tensions during the Donald Trump presidency. *Journalism*, 24(3), 475–493. <https://doi.org/10.1177/14648849211036622>
- Reuters Institute for the Study of Journalism. 2020. Digital News Report. <https://www.digitalnewsreport.org/survey/2020/resources-2020/>
- Saldaña, M. (2022) Who is to Blame? Analysis of Government and News Media Frames During the 2014 Earthquake in Chile, *Journalism Studies*, 23:1, 25-47, <https://doi.org/10.1080/1461670X.2021.1997152>
- Sobur, A. (2006). *Analisis Teks Media: Suatu pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.